

# Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten Luwu (Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli)

## *Community Participation in the Prevention of the Quality of Slum Settlements in Luwu Regency (A Case Study: Slum Settlement in Cimpu Area, Suli)*

Sofyan Thamrin<sup>1</sup>, Rudi Latief<sup>2</sup>, Syafri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu

<sup>2</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

E-mail: ruknirahayuu@gmail.com

Diterima: 22 September 2022/Disetujui 30 Desember 2022

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis tingkat kekumuhan, mengetahui faktor-faktor determinan dan merumuskan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian mix method. Untuk menganalisis tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu menggunakan analisis skoring baseline, untuk mengetahui faktor determinan yang menyebabkan tingkat kekumuhan digunakan analisis Regresi Linear Berganda dan untuk mengetahui pengaruh tingkat kekumuhan. Kesimpulan utama dalam penelitian ini yaitu Berdasarkan hasil analisis skoring baseline menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu masuk dalam kategori kumuh sedang. Untuk mengetahui faktor determinan yang menyebabkan tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu adalah kondisi bangunan gedung, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengolahan air limbah, kondisi pengolahan persampahan, proteksi kebakaran dan status kepemilikan lahan. Konsep makro penanganan kawasan kumuh di kawasan Cimpu adalah: pencegahan, pemugaran, dan peremajaan kawasan.

**Kata Kunci:** Permukiman Kumuh, Pencegahan, Peningkatan Kualitas

**Abstract.** This study aimed to analyze the level of slums, determine the determinant factors, and formulate strategies for preventing and improving the quality of settlements in the Cimpu area, Suli district, in Luwu. This type of research is mixed-method research. To analyze the level of slums in the Cimpu Area, Suli District, Luwu Regency using baseline scoring analysis to determine the determinant factors that cause the level of slums. Multiple Linear Regression analysis is used to determine the effect of the slum level. This study concludes that based on the results of the baseline scoring analysis, the level of slums in the Cimpu Area, Suli District, and Luwu Regency is in the medium slum category. Factors that cause the level of slums in the Cimpu area were the condition of buildings, conditions of drinking water supply, environmental drainage conditions, wastewater treatment conditions, waste management conditions, fire protection, and land ownership status. The macro concept of handling slum areas in the Cimpu area is prevention, restoration, and rejuvenation.

**Keywords:** Slums, Prevention, Quality Improvement



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Pendahuluan

Perkembangan suatu kota bagi negara-negara yang sedang membangun berlangsung relatif pesat karena daya tarik kota sangat kuat, baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomi (Suud & Navitas, 2015). Salah satu permasalahan pembangunan di perkotaan adalah munculnya arus urbanisasi yang semakin deras diakibatkan ketimpangan laju pembangunan di kota dibandingkan dengan di desa. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial

demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya. Secara sosiologis permukiman kumuh adalah suatu permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis, dengan gambaran dan kesan secara umum tentang masyarakat yang hidup dengan sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat

dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah ke bawah. Hal tersebut menjadi interpretasi umum bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh adalah pemukim yang tinggal atau berada didalam suatu lingkungan yang rendah kualitasnya dengan belum terpenuhinya standar pelayanan minimal manusia untuk hidup dengan layak.

Masalah permukiman kumuh tetap menjadi masalah utama yang dihadapi di wilayah perkotaan. Melonjaknya urbanisasi yang berlebihan akibat akumulasi sumber mata pencaharian di wilayah kota ternyata menjadi magnet yang cukup kuat bagi masyarakat pedesaan (khususnya golongan MBR) untuk bekerja di kawasan perkotaan dan tinggal di tanah ilegal yang berada di dekat pusat kota, hingga akhirnya menciptakan lingkungan kumuh. Di sisi lain, standar pelayanan minimal (SPM) kota sudah tidak terpenuhi lagi di beberapa kawasan permukiman yang berada di atas lahan lepas, yang pada akhirnya juga berdampak pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan kota. Tinggal di kawasan permukiman kumuh perkotaan tidak selalu menjadi pilihan namun menjadi suatu keharusan bagi MBR yang harus menerima begitu saja kondisi lingkungan perumahan yang tidak layak dan berada di bawah standar pelayanan minimal yang meliputi rendahnya kualitas air minum, drainase, limbah, sampah dan berbagai masalah yang meliputi kepadatan dan ketidak teraturan. Rumah yang selain berimplikasi pada meningkatnya bahaya kebakaran serta pengaruh sosial serta tingkat kriminalitas yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Kecamatan Suli merupakan salah satu titik kawasan kumuh di Kabupaten Luwu. Kondisi permukiman kumuh di Kecamatan Suli sebenarnya sudah terbentuk sejak lama, namun karena kurangnya perhatian dari pemerintah, permukiman kumuh di Kecamatan Suli tidak selalu terselesaikan. Salah satu lokasi prioritas permukiman kumuh yang perlu ditinjau di Kecamatan Suli adalah Kawasan Cimpu adapun Faktor atau kendala permukiman kumuh di Kawasan Cimpu adalah permasalahan sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memadai, sebagian besar merupakan MBR dan tidak memiliki akses untuk memenuhi hunian layak, secara keseluruhan bangunan tidak memiliki IMB, konstruksi bangunan sebagian besar terbuat dari bahan yang mudah terbakar (kayu) dengan kepadatan bangunan yang cukup tinggi serta mengancam kondisi kesehatan penghuni. Dengan begitu, permukiman yang berada pada Kawasan Cimpu di kategorikan kawasan kumuh sedang.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis tingkat kekumuhan, mengetahui faktor-faktor determinan dan merumuskan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

## Metode Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berlokasi di Permukiman Kawasan Cimpu, Desa Cimpu dan Desa Cimpu Utara, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

### b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa

jumlah bangunan, jumlah kepala keluarga, dan lain-lain sedangkan data kualitatif berupa hasil wawancara. Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer berupa kondisi bangunan, kondisi jalan, dan lain sebagainya serta data sekunder berupa data yang diperoleh di instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu dan instansi lainnya.

### c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bisa berupa manusia, tumbuhan, hewan, produk, bahkan dokumen. Jadi, populasi bukan hanya berupa manusia (Etta, 2010). Dalam penelitian ini, jumlah populasi diketahui secara pasti jumlahnya (finite population), yaitu penelitian menggunakan populasi unit hunian pada Kawasan Permukiman Cimpu, dengan jumlah populasi unit hunian sebanyak 825 unit bangunan.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 90 responden. Adapun cara pengambilan sampel penelitian ini di lakukan dengan teknik Purposive Sampling atau metode penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dan menggunakan teknik acak sederhana (Simple Random Sampling), dimana memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (Anggota) populasi untuk di pilih menjadi sampel. Namun berdasarkan metode pengambilan sampel itu, yang akan di teliti adalah faktor-faktor berpengaruh dan yang mempunyai keterkaitan dengan karakteristik pola ruang permukiman, sehingga sampel memiliki kriteria tertentu.

### d. Metode Analisis

#### 1. Analisis Skoring Baseline

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dipergunakan skoring berdasarkan kriteria PERMEN PUPR NO.2/PRT/M/2016. Skoring ini adalah proses penentuan skor atas jawaban responden yang dilakukan dengan membuat klasifikasi berdasarakan menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

#### 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terkait. Adapun rumus regresi linear berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

dimana:

Y = variabel terikat

a = konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = koefisien regresi

X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> = variabel bebas

#### 3. Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan dengan langkah sebagai berikut (1) Mengelompokkan kawasan permukiman yang sesuai dan tidak sesuai dengan Rencan Tata Ruang (Kumuh/Slum dan Squatter), (2) Membuat daftar kebutuhan penanganan baik itu dalam konteks pencegahan maupun permukiman kumuh illegal, (3) Merumuskan tujuan dan sasaran pengembangan permukiman berlandaskan kondisi, potensi, dan permasalahan kota/perkotaan dan kawasan, dan (4)

Merumuskan konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dalam bentuk matriks.

## Hasil dan Pembahasan

### a Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, lebih tepatnya berada di Desa Cimpu dan Desa Cimpu Utara dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan kawasan yang saat ini menjadi lokasi permukiman kumuh yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Luwu Nomor 219/IV/2002 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Luwu.

Secara administrasi Kawasan Cimpu memiliki Luas wilayah mencapai 11,96 Ha yang terbagi kedalam 2 Dusun, yang mana posisi geografis terletak pada LS 3°26'0,304 S" BT 120°23'56,967".



Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

### b Analisis Tingkat Kekumuhan

Hasil penelitian terkait penilaian tingkat kekumuhan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan dilokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Penilaian Tingkat Kekumuhan

Nilai	Kategori	Berbagai kemungkinan klasifikasi																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
71 – 95	Kumuh Berat	x	x	x	x	x	x												
45 – 70	Kumuh Sedang							x	x	x	x	x	x						
19 – 44	Kumuh Ringan													x	x	x	x	x	x
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Pertimbangan Lain																			
7 – 9	Pertimbangan Lain Tinggi	x	x					x	x						x				
4 – 6	Pertimbangan Lain Sedang			x	x					x	x					x		x	
1 – 3	Pertimbangan Lain Rendah					x	x					x	x					x	x
Skala Prioritas Penanganan		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Dari tabel analisis penilaian lokasi berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Cimpu maka tingkat kekumuhan, Pertimbangan Lain dan Legalitas Lahan Kawasan Cimpu yaitu (1) Tingkat Kekumuhan : Kumuh Sedang (Total Nilai 58), (2) Legalitas Lahan : Legal, dan (3) Pertimbangan Lain : Tinggi (Total Nilai 11);

### c Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu

Konsep dan Strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan juga disusun berdasarkan konsep penanganan kumuh berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 tahun 2018.

Untuk penetapan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu peneliti mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Muhammad Rosmansyah dan Asmah Suska (2020) yang menagngkat penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh yakni (1) Faktor yang bersifat langsung, Faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan sinitasi lingkungan). Faktor lingkungan perumahan menimbulkan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, koefisien dasar bangunan dan lain-lain, sedangkan faktos sanitasi lingkungan yang menimbulkan permasalahan meliputi kondisi air bersih, mandi cuci kakus, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga,

drainase dan jalan. (2) Faktor yang bersifat tidak langsung, Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan tetapi faktor-faktor ini berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan. Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial dan budaya masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep penanganan setiap kawasan kumuh akan berbeda sesuai dengan isu dan permasalahan masing-masing kawasan kumuh tersebut. Kawasan Cimpu memiliki tipologi permukiman kumuh di tepian air. Konsep makro penanganan kawasan kumuh di Kawasan Cimpu adalah: Pencegahan dan Pemugaran.

Adapun Strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, ialah:

#### 1. Konsep Pencegahan

Pola penanganan pencegahan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru di Kawasan Cimpu meliputi (1) Pengawasan dan Pengendalian: Kesesuaian Terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan (2)Pemberdayaan Masyarakat: Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Konsep pencegahan kawasan ini di titik beratkan pada area atau zona memiliki kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan (GSB, GSS,GSJ,IMB dan lainnya)

## 2. Konsep Peningkatan Kualitas

Konsep peningkatan kualitas yang diterapkan di Kawasan Cimpu meliputi Pemugaran dan Peremajaan Kawasan. Konsep Pemugaran merupakan jenis penanganan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami penurunan kondisi atau degradasi, sehingga dapat berfungsi kembali secara semula, misalnya perbaikan prasarana jalan, saluran air bersih, drainase dan lain-lain. Konsep ini merupakan penanganan permukiman yang sifatnya berupa meningkatkan kualitas permukiman yang sudah ada. Ciri kawasan yang sesuai untuk ditangani melalui upgrading adalah kawasan yang memiliki pattern kawasan regular, status tanah legal (secara tata ruang maupun kepemilikan lahan), dan kepadatan kawasan sangat tinggi.

Konsep Pemugaran yang dilakukan di Kawasan Cimpu antara lain (1) Rehabilitas bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun dengan jumlah 112 unit, (2) Rehabilitas jalan untuk mengembalikan kondisi jalan saat awal dibangun, meliputi perbaikan jalan rusak, (3) Rehabilitas sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, (4) Rehabilitas unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan meliputi optimalisasi SPAM 112 unit, dan (5) Penerapan : Peningkatan Kualitas Permukiman

Sedangkan konsep peremajaan diterapkan pada permukiman kumuh yang secara tata ruang, ekonomi dan perilaku tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak dapat ditangani hanya dengan perbaikan dan peningkatan fisik. Kondisi buruk secara struktur dapat mendorong terciptanya pemanfaatan ruang yang tidak efisien dan optimal sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

## Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu masuk dalam kategori kumuh sedang. Alternatif Konsep dan Strategi pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu terdiri atas dua, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas. Konsep pencegahan dilaksanakan melalui pola pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, berupa pemuatan regulasi terkait pembebasan lahan, sosialisasi dan pendampingan. Sedangkan konsep peningkatan kualitas dilaksanakan melalui pola pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali sarana dan Prasarana utilitas seperti jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah dan persampahan. Serta arahan konsep untuk pemugaran bangunan gedung permukiman, jalan, limbah komunal dan sistem proteksi kebakaran.

## Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2021). Kecamatan Suli dalam Angka 2021. Luwu: Badan Pusat Statistik  
Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2018). Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh (No. 14 Tahun 2018). Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Indonesia

Anonim, Pemerintah Republik Indonesia, (2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta.

Anonim, Pemerintah Republik Indonesia, (2011). Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta.

Damis, D.M., Kumurur, V.A., & Sela, R.L.E. (2014). Analisis Faktor-Faktor Kekumuhan Kawasan Permukiman Pesisir Tradisional (Studi Kasus: Desa Bajo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo). Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur, 6(1), 163-172.

Budiharjo, Eko. (1997). Arsitektur Pembangunan dan Konservasi, Penerbit Djambatan, Jakarta

Creswell, J. W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Anonim, Pemerintah Kabupaten Luwu, (2020). SK Bupati Nomor 219/IV/2022 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Luwu.

Etta Mamang Sangadji, Sopiah. (2010). Metodologi Penelitian. Yogyakarta.

Anonim, Panduan Penyusunan RP2KPKP, (2018). Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Permukiman Kumuh Perkotaan.

Suud, B., & Navitas, P. (2015). Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Jurnal Teknik ITS, 4(1), C33-C35.

Dzulqarnain. (2018). Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Nelayan (Studi Kasus Permukiman Kumuh Nelayan Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar) Iklim. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 11 No. 4 Desember 2014, Hal. 281 - 293